

**Moderasi Beragama di Aceh Tengah: Strategi Membangun Dialog Lintas  
Agama di Wilayah Multikultural**

Hal. 1

**Katimin, Ismawati Saragih**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

e-mail: [ismawatisaragih58@gmail.com](mailto:ismawatisaragih58@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini berjudul Moderasi Beragama di Aceh Tengah: Strategi Membangun Dialog Lintas Agama di Wilayah Multikultural. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yakni pada wilayah Aceh Tengah. Dalam pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan studi dokumen serta kajian literature pada penelitian sebelumnya di daerah yang lain. Data yang terkumpul dianalisis dengan tehknis reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Sehingga pertanyaan bagaimana praktik moderasi dan strategi dialog yang diterapkan di Aceh Tengah dapat terjawab. Selain itu tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan konsep moderasi beragama yang dipraktekkan di Aceh Tengah juga dapat tercapai. Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan menarik sebuah kesimpulan bahwa moderasi beragama dan dialog lintas agama di Aceh Tengah bukan hanya menciptakan suasana damai, tetapi juga memberikan manfaat konkret bagi pembangunan masyarakat. Praktik moderasi beragama di wilayah ini bukanlah sebuah konsep, tapi sebuah praktik nyata yang menunjukkan bahwa dengan saling menghormati, mematuhi aturan yang berlaku, serta terus membangun dialog, masyarakat dapat hidup berdampingan meskipun memiliki keyakinan yang berbeda. Keberhasilan dalam penerapan moderasi beragama dan terciptanya kerukunan di Aceh Tengah erat kaitannya dengan keterlibatan FKUB sebagai wadah untuk dilakukannya dialog antaragama. Jika potensi ini terus diberdayakan melalui program-program yang terstruktur dan berkelanjutan, Aceh Tengah dapat menjadi contoh keberhasilan penerapan moderasi beragama di Indonesia.

**Kata Kunci:** *Moderasi Beragama, Dialog, Multikultural*

## **Abstract**

*This research is entitled Religious Moderation in Central Aceh: Strategies for Building Interfaith Dialogue in a Multicultural Region. This research uses a qualitative approach with a case study method, namely in the Central Aceh region. Data collection uses observation, interviews and document studies as well as literature reviews on previous research in other areas. The collected data was analyzed using data reduction techniques, data presentation and drawing conclusions. So the question of how moderation practices and dialogue strategies are implemented in Central Aceh can be answered. Apart from that, the aim of this research is to describe the concept of religious moderation practiced in Central Aceh. Based on the research that has been conducted, a conclusion can be drawn that religious moderation and interfaith dialogue in Central Aceh not only create a peaceful atmosphere, but also provide concrete benefits for community development. The practice of religious moderation in this region is not a concept, but a real practice that shows that by respecting each other, obeying applicable rules, and continuing to build dialogue, people can live side by side even though they have different beliefs. The success in implementing religious moderation and creating harmony in Central Aceh is closely related to the involvement of FKUB as a forum for inter-religious dialogue. If this potential continues to be empowered through structured and sustainable programs, Central Aceh can become an example of the successful implementation of religious moderation in Indonesia.*

Hal. 2

**Keywords:** Moderation, Religion, Dialogue, Multicultural

## **1. PENDAHULUAN**

Sebuah teori tentang Identitas Sosial (Social Identity Theory), yang dikembangkan oleh Henri Tajfel dan John Turner, menjelaskan bahwa manusia cenderung mengategorikan diri mereka dalam kelompok sosial tertentu (seperti agama atau etnis) (Tajfel, H., 1986). Ketika seseorang mengidentifikasi kuat dengan kelompoknya, muncul perasaan "kami" versus "mereka," yang bisa mengarah pada stereotip, diskriminasi, dan konflik jika ada ketidaksepakatan antar kelompok. Mereka menganggap keanggotaannya sebagai hal yang sangat penting dalam membentuk siapa dirinya.

Hal ini pula yang menjelaskan munculnya konflik di masyarakat multicultural. Khususnya di Aceh, menciptakan tantangan tersendiri dalam memelihara kerukunan antarumat beragama. Aceh sebagai salah satu wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Islam, memiliki populasi non muslim yang cukup signifikan. Dalam kesehariannya hubungan antara umat beragama dalam konteks interaksi sosial dan

kultural tidak dapat dihindarkan. Maka persentase kemungkinan akan terjadinya ketegangan antara kelompok agama yang berbeda juga tidak dapat diabaikan.

Sebagaimana yang dikatakan Karl Marx bahwa dalam konteks agama, ketegangan bisa muncul ketika kelompok mayoritas merasa harus mempertahankan dominasi sosial dan budaya mereka, sementara kelompok minoritas merasa terpinggirkan atau berjuang untuk mendapatkan hak-hak mereka (Raines, J. C., 2002). Sedangkan dominasi umat Islam pada daerah Aceh menjadikan daerah ini sebagai salah satu daerah khusus yang memberlakukan hukum Qanun bagi warganya. Hal ini tentunya menjadi sebuah masalah bagi umat Kristen. Sebab mereka juga harus tetap mengikuti hukum qanun tersebut selama menjadi warga Aceh. Padahal beberapa dari ketentuan larangan yang ada dalam Qanun bukan sebuah pelanggaran dalam agamanya. Tapi karena menjadi komunitas minoritas, maka setuju atau tidak tetap harus ikut dalam aturan yang diberlakukan.

Kondisi inilah oleh Henri Tajfel akan lahir rasa "eksklusif" bagi kalangan mayoritas, dan sebaliknya kelompok minoritas akan mengembangkan sikap defensif (Tajfel, H., 1986). Hadirnya sikap eksklusif ini tentunya memberikan dampak negatif bagi kalangan minoritas. Sebagai contoh beberapa kasus yang ada di Aceh, yakni adanya pembatasan untuk perayaan hari Natal secara terbuka di Aceh, tentunya ini bisa menjadi permasalahan yang serius bila tidak dikelola dengan baik. Ketika umat Islam bisa merayakan hari-hari besarnya dengan leluasa, namun tidak bagi umat Kristiani. Contoh lainnya pada Kerusuhan di Aceh Singkil tahun 2015, dimana terjadi pembongkaran gereja oleh pemerintah setempat atas tuntutan masyarakat mayoritas dengan dalih gereja tersebut tidak memiliki izin resmi pembangunan.

Emile Durkheim menyebutkan bahwa masyarakat multicultural membutuhkan mekanisme integrasi yang kuat untuk mencegah ketegangan (Giddens, A, 2001). Berangkat dari teori di atas pendekatan yang sangat tepat pada kondisi saat ini adalah melalui pendekatan berbasis teori moderasi beragama yang tidak hanya mengedepankan prinsip keseimbangan dan toleransi, tetapi juga mencakup pembelajaran bersama tentang keberagaman agama.

Hingga kini telah banyak penelitian yang dilakukan terhadap konsep tersebut, diantara mengaitkan antara moderasi beragama berbasis kearifan lokal suku Pakpak

Aceh Singkil. Ternyata mengamalkan moderasi beragama yang akomodatif terhadap budaya local juga merupakan upaya menjaga keharmonisan antar umat beragama. Maka mencegah ketegangan antar umat beragama akan lebih mudah tercipta, hingga konflik juga tidak perlu terjadi. Namun pada realitasnya, masih banyak pemeluk agama yang belum tepat dalam mempraktikkan dari ajaran agamanya. Untuk itulah pentingnya saat ini menghidupkan prinsip-prinsip moderasi beragama kembali. Agar terciptanya masyarakat yang harmonis dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan tidak hanya sebatas wacana.

Pada dasarnya konsep ini bukanlah sebuah hal yang baru ditemukan. Sebab disemua agama tentunya mengajarkan pada hal-hal kebaikan baik dalam hubungan dengan Tuhan juga hubungan dengan sesama manusia. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan kaji konsep moderasi beragama yang diterapkan di Aceh Tengah, dan mendeskripsikan strategi yang digunakan dalam menjalin dialog antar lintas agama. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan baru tentang konsep moderasi beragama yang dipraktekkan di Aceh Tengah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan pendekatan berbasis agama yang moderat, serta membuka ruang bagi dialog yang lebih inklusif dan harmonis antaragama. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberi rekomendasi praktis bagi pemuka agama, dalam menerapkan prinsip moderasi untuk mengurangi potensi ketegangan antaragama di Aceh Tengah.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Studi kasus dipilih untuk mendalami secara spesifik pada praktik moderasi beragama di Aceh Tengah (Moleong, L. J., 2017). Sasaran dari penelitian ini adalah masyarakat Aceh Tengah, tokoh agama serta pihak yang terlibat dalam aktivitas dialog lintas agama di Aceh Tengah. Sampel dipilih secara purposive sampling, yakni tokoh agama, pemerintah dan masyarakat Aceh Tengah yang memiliki pengalaman terkait dengan isu moderasi dan dialog lintas agama.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi partisipan, wawancara mendalam (*in depth interview*) dengan tokoh agama, pemimpin masyarakat, studi

dokumentasi berupa analisis dokumen, juga kajian literature terkait moderasi beragama di daerah lain. Sedangkan yang menjadi instrument utama dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara dan lembar observasi yang dirancang untuk mengungkap pandangan, strategi serta tantangan moderasi beragama. Setelah data terkumpul maka dilanjutkan dengan analisis data yang dilakukan dengan tehnik reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Moderasi Beragama**

Moderasi beragama merupakan sikap beragama yang tidak ekstrem, baik dalam bentuk sikap radikal maupun liberal yang berlebihan. Lukman Hakim Saifuddin menerangkan bahwa banyak yang salah memahami ketika istilah moderasi ini diajukan, sehingga menganggap bahwa ini adalah cara Barat melemahkan Islam. Padahal dalam moderasi beragama bukan berarti yang dimoderasi adalah agamanya, tetapi cara kita beragama. Sebab untuk ajaran agama tentulah sudah pasti moderat. Hanya saja ketika agama telah membumi, maka pada hakikatnya ia akan menjadi sesuatu yang dipahami oleh manusia yang bersifat terbatas dan relative. Sehingga tentunya ini akan melahirkan keragaman penafsiran dan pemahaman yang berbeda-beda. Oleh karena itu, moderasi beragama ini merupakan keniscayaan untuk menghindari penafsiran yang berlebihan dan paham agama yang ekstrem. Kemunculan konflik antar umat beragama juga akan terhindari.

Merriam Webster Dictionary (kamus digital), istilah moderasi diartikan menjauhi perilaku, gagasan, dan ungkapan yang ekstrim (Merriam-Webster., n.d.). Dalam hal ini, tentu seseorang yang moderat adalah seorang yang dapat menjauhi perilaku-perilaku dan ungkapan-ungkapan yang ekstrim. Ungkapan yang mengandung nilai nilai keadilan didalamnya. Dari ini pahamih kita bahwa dengan menanamkan nilai keadilan dan menghindari hal ekstrem dalam beragama, telah membawa kita pada penanaman nilai moderasi dalam beragama.

Ternyata istilah ini tidak seburuk yang dituduhkan bagi sebagian orang yang menyebutkan bahwa ini hanyalah produk barat yang ingin memberikan batasan pada Islam khususnya. Tuduhan ini biasanya muncul pada mereka yang berasumsi bahwa

moderasi beragama bertujuan untuk "melemahkan" agama atau mengakomodasi nilai-nilai asing yang bertentangan dengan keyakinan agama tertentu. Padahal tuduhan itu tidaklah memiliki dasar yang kuat untuk dijadikan alasan penolakan pada konsep ini. Jika saja dapat dipahami secara lurus maksud dan tujuannya, maka tidak akan ada penolakan maupun penentangan. Moderasi beragama adalah konsep yang berakar kuat dalam ajaran-ajaran agama besar, termasuk Islam, Kristen, Hindu, Budha dan lainnya. Dalam Islam misalnya, konsep ini selaras dengan ajaran "ummatan wasathan" yang banyak disebutkan dalam Alquran. Dalam agama lain, nilai-nilai seperti kasih sayang, penghormatan sesama umat beragama juga menunjukkan bahwa konsep ini sejalan dengan ajaran agama itu sendiri. Karena seyogyanya nilai-nilai yang terkandung didalam moderasi beragama bukan lah suatu hal yang bertentangan pada ajaran agama manapun. Bahkan bila diterapkan pada masyarakat multicultural akan menciptakan keharmonian social dan menjaga hubungan antar agama (Shihab, 2019).

Selanjutnya sebagai upaya membangun hubungan yang baik antara agama dengan multikulturalisme, maka diperlukan dua hal yaitu, reinterpretasi doktrin-doktrin keagamaan yang dijadikan pembenaran untuk bersikap eksklusif dan yang kedua yaitu mendialogkan agama dengan gagasan-gagasan modern. Dengan penafsiran ulang dan upaya dialog dalam beragama akan menghasilkan sikap saling memahami dalam perbedaan. Sebab perbedaan adalah sesuatu yang wajar dan tidak perlu dipertentangkan. Seharusnya perbedaan itu dijadikan sebagai pembanding, pendorong, penguat, dan pemurni dari apa yang dimiliki (Suparlan, P., 2004).

Permasalahan dalam menyikapi perbedaan ini pulalah yang menjadi sebab pada beberapa konflik yang beberapa waktu kebelakang telah menjadi ancaman bagi keutuhan bangsa Indonesia. Sejatinya Indonesia merupakan rumah bagi berbagai agama, etnis dan budaya yang masing masing memiliki doktrin dan ajaran yang berbeda. Maka multikulturalisme ini membutuhkan pendekatan yang menekankan toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan tersebut (Jamaluddin, 2022). Melihat kondisi itu, Kementerian Agama melalui K.H Lukman Hakim Syaifuddin giat mengkampanyekan dan menggerakkan moderasi beragama dalam program-program Kemenag. Bahkan tahun 2023 tepatnya tanggal 26 Juli secara serentak dilaksanakan peluncuran/ launching Kampung Moderasi Beragama secara Nasional (Satiran, 2023).

Melihat besarnya kontribusi yang diberikan oleh konsep moderasi beragama bagi keharmonisan dalam masyarakat multicultural, menjadi magnet bagi peneliti-peneliti untuk melakukan penelitian lebih mendalam. Seperti pada tulisan Erman Sepniagus Saragih, Moderasi Beragama Berbasis Kearifan Lokal Suku Pakpak Aceh Singkil: bahwa mengamalkan moderasi beragama yang akomodatif terhadap budaya local juga merupakan upaya menjaga keharmonisan antar umat beragama. Sebab praktik moderasi beragama senantiasa berkorelasi dengan kebudayaan. Salah satunya tradisi local suku Pakpak, mamiring-serbebe dimana tradisi ini memiliki ajaran untuk membagi bagikan roti dengan menggunakan piring makan. Meski tradisi ini lebih sering dilakukan saat hari raya umat Islam, namun interaksi langsung pada saat pembagian itu membuka jalan silaturahmi. Hal ini tentunya akan terjalin hubungan yang baik antar tetangga dan masyarakat setempat (Erman Sepniagus Saragih, 2022). Pada penelitian yang lain, Muis Saifuddin Anshari Pikhulan menulis tentang peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam merawat toleransi dan moderasi beragama di Kota Ambon. Kegiatan dialog dengan menghadirkan beberapa elemen masyarakat menjadi salah satu cara yang dilakukan FKUB di Kota Ambon untuk menciptakan kerukunan umat beragama (Muis Saifuddin Anshari Pikhulan, 2023).

Ditahun 2024 ini juga hadir sebuah penelitian yang dilakukan oleh E. Yuliana berjudul Moderasi Beragama Sebagai Basis Kehidupan social: Telaah Filosofis Dalam Islam Kontemporer. Disimpulkan dalam penelitian tersebut bahwa moderasi beragama bukan hanya sekedar konsep teologis, tetapi juga merupakan kebutuhan mendesak untuk membangun kehidupan social umat seluruh dunia. Moderasi juga dianggap sebagai kunci penting untuk bisa menangkal masuknya sikap radikal pada daerah yang memiliki keragaman budaya dan agama (Evi Yuliana, 2024).

Melihat pentingnya moderasi ini dalam mewujudkan harmonisasi antar umat beragama, penelitian tersebut tidak pada wilayah Islam saja, dari sudut pandang agama lain juga telah dilakukan, dalam kepercayaan Kristen misalnya moderasi dibahas sebagai alat untuk mengurangi ketegangan antaragama (Sundays, 2019). Perwujudan dialog antaragama dapat dioptimalisasi melalui penguatan prinsip-prinsip moderasi dan saling menghormati (Squires, 2020).

Dari penelitian yang telah dilakukan diatas, tergambar dan memberikan

kesimpulan yang jelas bagi kita, pentingnya untuk mengintegrasikan moderasi dalam beragama, sebagai bagian dari strategi memperkuat dialog antarumat beragama di Indonesia, khususnya pada tulisan ini di wilayah Aceh Tengah.

### **Praktek Moderasi Beragama di Aceh Tengah**

Hal. 8

Penyematan kampung moderasi pada beberapa wilayah di Indonesia, merupakan upaya konkret untuk menerapkan nilai-nilai moderasi beragama ditingkat komunitas. Salah satu kampung yang mendapat gelar tersebut adalah kampung Hakim Bale Bujang, kecamatan Lut Tawar kabupaten Aceh Tengah. Terpilihnya kampung tersebut sebagai kampung moderasi beragama karena terdapat sejumlah factor pendukung. Diantaranya dikampung Hakim Bale Bujang terdapat sejumlah rumah ibadah dari berbagai agama yang dibangun secara berdampingan, yakni berdirinya gereja dan vihara milik agama Budha. Meski rumah ibadah tersebut dibangun dikawasan muslim, masyarakat setempat dapat hidup berdampingan tanpa adanya gesekan atau konflik antar agama. Para menganut agama lain dapat mempergunakan rumah ibadah tersebut dengan aman. Dan ini telah berlangsung lama. Jauh sebelum konsep ini di canangkan oleh kementerian agama RI.

Dari penelusuran peneliti, kearifan local masyarakat Gayo yang memiliki sikap ramah dan terbuka menjadi bagian penting dalam hal penerimaan perbedaan keyakinan yang hadir di tengah masyarakat. Maka dari itu praktek pada nilai-nilai yang terkandung dalam konsep moderasi beragama tersebut sudah dilakukan sejak lama (Lubis, A. Y, 2019). Akan menjadi sebuah pertanyaan besar bila muncul penilaian pihak luar beberapa tahun lalu yang menyimpulkan dan memberikan nilai rendah untuk hubungan umat beragama di Aceh. Langkah yang diambil oleh pihak luar tersebut dengan menyama ratakan untuk semua wilayah pada satu kasus, menurut peneliti bukanlah hal yang benar. Karena kasus yang terjadi hanya pada satu wilayah di Aceh, tidak untuk wilayah bagian lainnya.

Kehadiran kampung moderasi beragama yang ada di Aceh Tengah, merupakan salah satu penggugur dari asumsi yang salah tersebut. Kerukunan yang tercipta antar umat beragama di Aceh Tengah, merupakan hasil kolaborasi antara berbagai pihak agama. Sebab tidak akan mungkin terwujud kerukunan tersebut dalam

durasi waktu yang panjang, bila antar pihak umat beragama tidak saling mendukung dan bekerjasama.

Antar umat beragama baik Kristen, Budha, dan Hindu juga Islam di Aceh Tengah, saling memahami bahwa hubungan yang dijalin dalam masyarakat ini merupakan refleksi dari ajaran agama masing-masing. Ini yang menjadi kunci dari terwujudnya kerukunan tersebut. Tidak ada keinginan untuk saling mengusik dan mengganggu apalagi intimidasi terhadap kelompok minoritas. Semua bersosialisasi dan berinteraksi tanpa harus membedakan agama.

Hal. 9

Kerukunan yang tercipta di Aceh Tengah merupakan buah dari rasa toleransi yang cukup tinggi antar umat beragama. Seperti yang disebutkan diatas, berdirinya rumah ibadah beberapa agama selain Islam di tengah pemukiman warga muslim, menunjukkan adanya sikap saling menerima perbedaan pada keyakinan. Tidak hanya itu, gambaran saling menghargai dan menghormati ini juga ditunjukkan pada keterbukaan umat kristiani pada masyarakat muslim terkait penerimaan siswa pada lembaga pendidikan dibawah naungan Gereja.

Aceh Tengah memiliki 2 buah gereja yang berizin resmi. Salah satunya bernama gereja Santa Pertrus. Gereja ini memiliki sebuah lembaga pendidikan, di bawah yayasan gereja. Pendidikan mulai tingkat Playgroup hingga SMA. Untuk Playgroup dan TK bangunannya berada tepat di lingkungan kawasab gereja. Lembaga pendidikan ini diperuntukkan bagi anak anak Kristen yang ingin melanjutkan pendidikan dan mengajarkan ajaran kekristenan (Suster Goretti, Wawancara 14 Jnauari 2025). Sebab wilayah Aceh Tengah yang mayoritas adalah muslim, tentunya penyediaan pendidikan bagi warga non muslim akan sulit didapatkan.

Menurut narasumber yang peneliti temui, sebagian besar siswa pada sekolah itu adalah muslim. Mulai dari tingkat PG, TK, SD, SMP, dan SMA. Bahkan guru yang mengajar juga banyak yang beragama Islam. Kondisi ini bukan saja didasari oleh alasan minimnya SDM yang dimiliki oleh pihak gereja sebagai pengelola. Tetapi lebih pada adanya sikap toleransi dan keadilan yang dimiliki mereka. Penerimaan mereka terhadap perbedaan keyakinan siswa dan memberikan kesempatan tanpa memandang latar belakang agama adalah tampilan dari wajah moderasi beragama.

Beberapa waktu ketika dilakukan observasi dan wawancara, peneliti melihat

langsung bagaimana para siswa dan guru berbaur dan melakukan tugasnya masing masing tanpa ada perbedaan hak dan kewajiban. Anak-anak beragama Kristen belajar dan bermain dikelas yang sama dengan guru yang sama. Pihak Gereja sebagai bagian dari yayasan memberikan waktu khusus pada pelajaran agama. Anak anak beragama Islam akan keluar kelas ketika jam agama Kristen berlangsung. Demikian sebaliknya. Sehingga hak masing masing penganut agama tidak terganggu.

Hal. 10

Menurut salah satu guru disana beberapa kegiatan yang ada dikelas, seperti memberi salam, membaca doa sebelum belajar secara Islam, diberlakukan di kelas, dan pihak sekolah (gereja) tidak menolak hal itu, sebab memahami bahwa mayoritas siswa bahkan guru yang mengajar merupakan umat agama Islam. Bahkan beberapa tahun belakang ini, menurut sumber informasi peneliti, pihak gereja memberikan izin untuk dilakukan perayaan peringatan hari besar Islam, seperti Maulid Nabi Saw. Dukungan ini tidak sebatas pada izin pelaksanaan saja, tetapi pihak gereja juga membantu pendanaan pada kegiatan tersebut seperti penyewaan gedung acara dan lainnya (Sofia, Wawancara Pribadi, 19 November 2024).

Pemenuhan atas hak baik bagi siswa maupun guru yang mengajar di sekolah tersebut juga tidak ada pembedaan dan diskriminasi. Ini terbukti dari bertahannya para guru sebagai pengajar di sekolah tersebut dalam jangka waktu yang panjang bahkan ada yang telah sampai 20 tahun. Sikap yang ditampilkan oleh umat agama Kristen di Aceh Tengah ini menunjukkan betapa kesadaran diri untuk bisa menghargai dan menghormati umat agama lain sebagai jalan kunci terciptanya kerukunan. Mungkin bila saja mereka yang minoritas ini tidak memiliki rasa untuk saling menghormati dan menghargai agama selain agamanya, maka mustahil akan terwujud kerukunan. Dampak terbesarnya akan muncul konflik antar agama. Dan kedamaian yang menjadi harapan bangsa tentunya akan sulit didapat.

Praktik moderasi beragama di Aceh Tengah lainnya dapat terlihat pada perayaan hari besar agama. Pada beberapa perayaan hari besar agama selain Islam, perayaan Natal misalnya, tetangga muslim yang berada disekitaran gereja ikut membantu menjaga keamanan acara dan memberikan ruang pada umat agama tersebut untuk beribadah sesuai keyakinannya. Tidak serta merta karena mereka kelompok minoritas hingga dilakukan diskriminasi pada haknya. Kesadaran untuk

bertoleransi pada ranah ini juga memperlihatkan adanya nilai-nilai moderasi beragama yang dipraktikkan dalam bermasyarakat multicultural di Aceh Tengah.

Pada saat-saat tertentu, seperti saat umat Islam melakukan ibadah sholat jumat, seluruh para pedagang yang memiliki toko diwajibkan untuk menutup dagangannya hingga waktu sholat jumat berakhir. Aturan ini juga diikuti oleh para pedagang non muslim lainnya. Sikap saling menghormati dalam hal inilah yang menjadi salah satu pupuk penyubur bagi tumbuhnya kerukunan di Aceh Tengah.

Kerukunan antarumat beragama yang terjalin dengan baik lainnya juga erat kaitannya dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menjalankan perannya menjaga harmoni antaragama. Berdasarkan data, sikap masyarakat terhadap pemerintah berada pada kategori "Tinggi". Hal ini dimungkinkan berkat berbagai kegiatan yang dilaksanakan pemerintah, terutama melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) (Muhammad Riza, 2019).

Hal. 11

### **Strategi Membangun Dialog Lintas Agama**

Membangun dialog lintas agama di wilayah multikultural sejatinya membutuhkan strategi yang terencana dan berorientasi pada penguatan harmoni di tengah keberagaman (Esposito, J. L., Fasching, D. J., & Lewis, T, 2015). Sebab wilayah multikultural memiliki tantangan dan potensi yang unik karena keberadaan beragam agama, budaya, dan nilai-nilai sosial. Begitu juga yang dilakukan pada Aceh Tengah.

Masyarakat Aceh Tengah umumnya tidak menghadapi kendala dalam berinteraksi dengan individu atau kelompok dari latar belakang agama yang berbeda. Namun, masalah mulai muncul ketika interaksi tersebut menyentuh ranah pribadi. Hal ini dapat dimaklumi mengingat masyarakat Aceh Tengah mayoritas beragama Islam. Dalam ajaran Islam, terdapat prinsip yang mengatur pola hubungan dengan orang-orang non-Muslim. Masyarakat Muslim didorong untuk berbuat baik dan saling melindungi, tetapi dalam hal keyakinan atau akidah, Islam secara tegas menyatakan, "*Bagimu agamamu dan bagiku agamaku.*" Oleh karena itu, tidak mengherankan jika umat Islam cenderung tidak mentoleransi hal-hal seperti pernikahan lintas agama atau isu-isu pribadi lainnya. Tetapi hingga kini belum ada peristiwa besar yang muncul terkait interaksi sensitif itu.

Fakta ini menunjukkan bahwa toleransi antarumat beragama di Aceh Tengah lebih mudah terwujud dalam ranah publik, namun menjadi lebih terbatas ketika menyentuh ranah privat. Konflik bisa terjadi pada kasus tertentu, seperti pemanfaatan bangunan tertentu sebagai tempat ibadah tanpa mematuhi ketentuan yang berlaku di Aceh. Sementara itu, mayoritas masyarakat percaya bahwa konflik sensitif antarumat beragama dapat dihindari jika semua pihak mematuhi aturan-aturan yang berlaku dan menjaga posisi masing-masing dalam konteks kerukunan beragama.

Pemenuhan aturan-aturan yang berlaku tentunya membutuhkan sosialisasi dan dialog yang menjadi jalan agar aturan yang telah dibuat tersebut tersampaikan dengan pemahaman yang benar. Pemerintah dalam hal ini memiliki peran besar dalam menemukan strategi yang tepat untuk berjalannya dialog lintas agama yang dimaksud. Melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai lembaga independen yang difasilitasi oleh pemerintah, nyatanya telah menjadi wadah efektif bagi lahirnya masyarakat yang harmonis, toleran, dan inklusif di tengah keberagaman agama di Aceh Tengah ini.

Hadirnya FKUB tidak saja sebagai wadah penghubung lintas agama, namun juga pada komunitas satu agama. Sebab konflik tentang agama tidak hanya terjadi pada lintas agama yang berbeda, tetapi juga bisa muncul pada intra-agama (satu agama yang sama). Pada posisi inilah peran FKUB dibutuhkan untuk menjadi wadah dialog antar kelompok dalam menyelesaikan perbedaan praktik dalam agama tersebut secara damai (Inmas Aceh, 2021).

FKUB Aceh Tengah secara rutin mengadakan kegiatan tahunan seperti dialog internal antarumat beragama, dialog antaragama, sosialisasi kerukunan, dan penyuluhan terkait aturan pendirian rumah ibadah sesuai Qanun Nomor 4 Tahun 2016. Selain itu, FKUB juga aktif menyikapi isu-isu kerukunan yang berkembang secara nasional, seperti dalam kasus Tolikara dan Singkil. Upaya ini menunjukkan bahwa peran dan fungsi FKUB di Aceh Tengah telah berjalan dengan baik, memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan dan memelihara kerukunan antarumat beragama di wilayah tersebut.

Seperti kegiatan yang digelar FKUB baru baru ini, untuk menciptakan Pilkada yang aman dan damai tahun 2024 lalu, melalui forum tersebut diadakan dialog untuk

membangun komitmen bersama tokoh-tokoh dari berbagai latar belakang demi terciptanya suasana Pilkada yang damai, aman dan tertib di Aceh Tengah (Ridwan Qari, Ketua FKUB, 17 Oktober 2024) .

Penyuluhan terkait aturan pendirian rumah ibadah sesuai Qanun Nomor 4 Tahun 2016, juga menjadi bagian penting dalam dialog lintas agama. Upaya ini dilakukan sebagai respons terhadap masalah yang pernah muncul terkait pemanfaatan bangunan tertentu sebagai tempat ibadah, yang sering kali disalahpahami oleh sebagian kecil pendatang dari agama minoritas di Aceh Tengah. Sosialisasi ini mendapat dukungan langsung dari FKUB Provinsi Aceh dan bertujuan untuk menjelaskan kekhususan Aceh dalam menerapkan kerukunan umat beragama, yang memiliki beberapa perbedaan dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia pada umumnya.

### **Dampak Moderasi dan Dialog Lintas Agama di Aceh Tengah**

Moderasi beragama mendorong masyarakat untuk mengedepankan sikap toleransi, menghargai perbedaan, dan bekerja sama dalam ranah publik. Masyarakat Aceh Tengah dalam hal ini menunjukkan kecenderungan positif dalam berinteraksi dengan individu atau kelompok agama lain, selama interaksi tersebut tidak menyentuh ranah privat. Saling menghormati hal-hal privasi pada agama lain juga upaya menghindari munculnya gesekan dan konflik. Hal ini relevan dengan peran FKUB dalam mensosialisasikan aturan, seperti pendirian rumah ibadah yang dapat mengurangi konflik akibat perbedaan persepsi.

Moderasi beragama di Aceh Tengah juga memberikan peluang pada pengurangan potensi diskriminasi. Sebab prinsip moderasi agama mengajarkan keseimbangan antara keyakinan yang kuat dengan penghormatan terhadap hak orang lain, dalam konteks Aceh Tengah, meskipun mayoritas penduduknya Muslim, ada upaya menjaga harmoni dengan umat agama lain dalam kehidupan sosial sehari-hari. Memberikan ruang dan kesempatan bagi umat agama lain menjalan ibadah dan perayaan hari besar merupakan bagian dari penghormatan oleh umat Islam sebagai kalangan mayoritas. Melakukan interaksi social antar agama seperti mengunjungi tetangga beda agama yang sakit, melakukan jual beli pada pedagang beda keyakinan

dan lainnya juga bagian dari dampak moderasi beragama yang ada di Aceh Tengah. Sebab dengan adanya moderasi juga memelihara harmoni social dan membantu pembentukan identitas kolektif masyarakat yang inklusif, di mana perbedaan tidak menjadi alasan untuk konflik, tetapi peluang untuk belajar dan berkembang bersama.

Kerukunan dan kedamaian antar umat beragama di Aceh Tengah juga diciptakan melalui dialog lintas agama. Dengan dialog akan mengurangi konflik dan peningkatan kerja sama antarumat beragama. Melalui dialog lintas agama ini pula hingga terjadinya komunikasi terbuka antarumat beragama, sehingga mencegah salah paham yang berujung pada konflik. Berdasarkan fakta peristiwa di beberapa wilayah, konflik yang berpotensi muncul, seperti penggunaan bangunan sebagai tempat ibadah, dapat diredam jika semua pihak menjalankan aturan yang disepakati bersama. Caranya adalah dengan jalan dialog. Dengan dialog, masing-masing kelompok agama dapat memahami perspektif dan nilai-nilai agama lain, sehingga menciptakan empati dan pengertian yang lebih baik. Proses ini berkontribusi pada hubungan yang lebih harmonis di masyarakat multikultural. Dan inilah yang telah berjalan di Aceh Tengah sebagai wilayah multicultural.

Melalui forum dialog lintas agama ini juga memfasilitasi kerja sama di Aceh Tengah dalam isu-isu sosial yang menjadi kepentingan bersama, seperti pendidikan, lingkungan, dan pengentasan kemiskinan. Kerja sama ini memperkuat rasa persatuan meskipun ada perbedaan keyakinan. Melalui dialog, pihak-pihak yang berbeda agama dapat membangun rasa saling percaya dan menghormati, yang merupakan dasar penting untuk mencegah konflik di masa depan. Ketika konflik terjadi, dialog lintas agama menyediakan ruang untuk membahas masalah secara damai dan mencari solusi yang adil bagi semua pihak. Tentunya konflik dapat dihindari jika aturan dan tanggung jawab masing-masing pihak dipatuhi.

### **Tantangan dan Peluang Dalam Penerapan Moderasi Beragama di Aceh Tengah**

Tantangan:

1. Pemahaman yang Beragam Tentang Moderasi Beragama

Sebagian masyarakat memiliki pemahaman yang terbatas atau berbeda tentang moderasi beragama, sehingga sulit mencapai kesepahaman. Pandangan ini

biasanya dipengaruhi oleh pemahaman agama yang sempit dan kurangnya akses terhadap informasi yang benar tentang moderasi beragama.

2. Dominasi Agama Mayoritas

Dominasi agama mayoritas dapat mempengaruhi akses agama minoritas untuk menjalankan keyakinan mereka, termasuk dalam hal perizinan rumah ibadah atau pelaksanaan kegiatan keagamaan.

3. Salah Tafsir terhadap Kebijakan Lokal

Kekhususan Aceh dengan penerapan syariat Islam kadang disalahartikan oleh pendatang dari agama minoritas, sehingga menimbulkan kesalahpahaman atau ketegangan.

4. Kurangnya Dialog Antaragama

Dialog lintas agama yang terbatas membuat kesempatan untuk memperkuat pemahaman dan toleransi antarumat beragama menjadi kurang optimal.

5. Stereotip dan Prasangka

Adanya stereotip atau prasangka terhadap kelompok agama tertentu dapat memicu konflik sosial dan menghambat kerukunan.

Peluang:

1. Dukungan dari FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama)

FKUB di Aceh Tengah dapat berperan aktif sebagai mediator dan fasilitator dalam memperkuat dialog dan toleransi antarumat beragama.

2. Kearifan Lokal sebagai Modal Sosial

Budaya local masyarakat Gayo yang menjunjung tinggi gotong royong dan musyawarah serta terbuka dapat digunakan untuk menciptakan harmoni dalam kehidupan beragama.

3. Komitmen Pemerintah dan Tokoh Masyarakat

Dukungan pemerintah daerah serta tokoh agama dan adat memberikan peluang besar untuk menyosialisasikan nilai-nilai moderasi beragama secara luas.

4. Keberagaman Sebagai Kekayaan Sosial

Masyarakat yang terdiri dari berbagai latar belakang agama dapat menjadi aset untuk menciptakan kolaborasi dalam kegiatan sosial yang bermanfaat bagi semua pihak.

5. Peningkatan Pendidikan Toleransi

Penguatan pendidikan multikultural dan toleransi melalui sekolah dan komunitas dapat membantu generasi muda memahami pentingnya moderasi beragama.

6. Kerja Sama Antar Komunitas Agama

Kolaborasi dalam kegiatan sosial, seperti bantuan kemanusiaan atau peringatan hari besar nasional, dapat mempererat hubungan antaragama.

Hal. 16

## **SIMPULAN**

Moderasi beragama di Aceh Tengah bukan hanya sekadar konsep, tetapi telah menjadi praktik nyata yang memberikan kontribusi signifikan bagi kerukunan antarumat beragama. Dialog lintas agama yang dijalankan dengan strategi yang tepat menjadi alat penting untuk memelihara harmoni sosial. Tantangan yang ada harus diatasi melalui pendidikan, dialog, dan keterlibatan semua pihak, sehingga potensi konflik dapat diminimalkan dan peluang kerja sama semakin ditingkatkan.

Diluar dari tantangan yang ditemukan dalam penerapan moderasi beragama, Aceh Tengah memiliki peluang besar untuk terus mengembangkan moderasi beragama sebagai kekuatan sosial. Keberadaan lembaga seperti FKUB, dukungan pemerintah, serta kearifan lokal masyarakat yang sudah terbiasa hidup berdampingan menjadi modal utama. Jika potensi ini terus diberdayakan melalui program-program yang terstruktur dan berkelanjutan, Aceh Tengah dapat menjadi contoh keberhasilan penerapan moderasi beragama di Indonesia.

Kerukunan yang terjalin di Aceh Tengah juga menjadi model positif bagi daerah lain yang menghadapi tantangan multikulturalisme. Praktik moderasi beragama di wilayah ini menunjukkan bahwa dengan saling menghormati, mematuhi aturan yang berlaku, serta terus membangun dialog, masyarakat dapat hidup berdampingan meskipun memiliki keyakinan yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa keberagaman bukanlah halangan untuk mencapai kedamaian, tetapi justru menjadi aset untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis. Jika potensi ini terus diberdayakan melalui program-program yang terstruktur dan berkelanjutan, Aceh Tengah dapat menjadi contoh keberhasilan penerapan moderasi beragama di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Erman Sepniagus Saragih. (2022). *Moderasi Beragama Berbasis Kearifan Lokal Suku Pakpak Aceh Singki. Vol 4, No 2.*
- Esposito, J. L., Fasching, D. J., & Lewis, T. (2015). *World religions today (5th ed.)*. Oxford University Press. Hal. 17
- Evi Yuliana. (2024). MODERASI BERAGAMA SEBAGAI BASIS KEHIDUPAN SOSIAL: TELAAH FILOSOFIS DALAM ISLAM KONTEMPORER. *Tadbiruna, Volume 3,(Nomor 2)*.  
<http://jurnal.iuqibogor.ac.id>
- Giddens, A. (2001). *Sociology (5th ed.)*. Polity Press.
- Inmas Aceh. (2021). *Buka Dialog Lintas Agama, Kakankemenag Aceh Tengah: Intoleransi Ancaman Persatuan Bangsa*. <https://aceh.kemenag.go.id/baca/buka-dialog-lintas-agama-kakankemenag-aceh-tengah:-intoleransi-ancaman-persatuan-bangsa-->
- Jamaluddin, J. (2022). Implementasi Moderasi Beragama Di Tengah Multikulturalitas Indonesia. *As-Salam: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu ...*, Query date: 2024-07-03 00:18:21.  
<https://www.journal.stai-yamisa.ac.id/index.php/assalam/article/view/62>
- Lubis, A. Y. (2019). *Kearifan lokal sebagai basis moderasi beragama di Indonesia*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Merriam-Webster. (n.d.). *In Merriam-Webster.com dictionary*. <https://www.merriam-webster.com>
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Riza. (2019). RELASI ANTAR IMAN DI NEGERI SYARI'AT ISLAM (STUDI PERAN DAN FUNGSI FKUB DALAM MENJAGA KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA DI ACEH TENGAH. *Jurnal As-Salam, Vol.3(1)*., 48–60.
- Muis Saifuddin Anshari Pihahulan. (2023). Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Merawat Toleransi dan Moderasi Beragama di Kota Ambon. *KENOSIS: JURNAL KAJIAN TEOLOGI, Vol. 9 No. 1*. <https://doi.org/DOI:10.37196/kenosis.v9i1.655>

Raines, J. C. (2002). *Marx on Religion*. Temple University Press.

Satiran. (2023). *Aceh Tengah Miliki Kampung Moderasi Beragama*.

<https://www.rri.co.id/daerah/297326/aceh-tengah-miliki-kampung-moderasi-beragama>

Shihab, M. (2019). *Wasathiyah Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*.

books.google.com.

[https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=WwfZDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=moderasi+beragama&ots=P-mJ0TJ4TQ&sig=I-QFtZtdoze0pt\\_6L7BvjO-5x-A](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=WwfZDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=moderasi+beragama&ots=P-mJ0TJ4TQ&sig=I-QFtZtdoze0pt_6L7BvjO-5x-A)

Suparlan, P. (2004). *Hubungan antaragama dalam masyarakat multikultural*. LKiS.

Tajfel, H., T., J. C. (1986). *he social identity theory of intergroup behavior*. In S. Worchel & W. G. Austin (Eds.), *Psychology of Intergroup Relations* (pp. 7–24). Nelson-Hall.